

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan begitu penting dalam kehidupan manusia. Setiap elemen masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi dirinya termasuk masyarakat yang berkebutuhan khusus karena memiliki keterbatasan fisik dan mental. Hal itu seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1, yang menyatakan bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”.¹ Selain itu diperkuat pula oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 2 dan 4 yang disebutkan bahwa: ayat 2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus; dan ayat 4. Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.² Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 menyatakan bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.³

Undang-undang di atas menunjukkan bahwa setiap anak yang mengalami disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, namun

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1.

² Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 5, ayat 2 dan 4.

³ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009.

dalam realitasnya masih banyak anak disabilitas yang belum tersentuh pendidikan dengan alasan terbatasnya sekolah, tempatnya yang jauh atau alasan lain sehingga pemerataan pendidikan bagi anak disabilitas masih belum terpenuhi, dengan demikian perlu diupayakan melalui pendidikan inklusi.

Pemerintah telah mengambil berbagai strategi untuk mengembangkan pendidikan inklusif, baik melalui diseminasi ideologi pendidikan inklusif, mengubah peranan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada agar menjadi pusat sumber, penataran atau pelatihan bagi guru-guru SLB maupun guru-guru sekolah reguler, reorientasi pendidikan guru LPTK, desentralisasi dalam implementasi pendidikan inklusif, pembentukan kelompok kerja pendidikan inklusif, hingga pembukaan program magister dalam bidang inklusif dan pendidikan kebutuhan khusus.⁴

Pendidikan inklusi itu sendiri, yaitu keadilan bagi setiap orang untuk mengakses dan memperoleh pendidikan bagi individu yang memiliki perbedaan tertentu untuk belajar di sekolah reguler. Bennet menambahkan, sekolah inklusi dirancang untuk menjadi sekolah yang heterogen, dan harapannya bisa menjawab semua kebutuhan individu dalam hal pendidikan dalam konteks sosial yang sama, tidak ada persyaratan khusus untuk bisa menjadi siswanya, di mana sekolah inklusi memang ditujukan agar anakss berkebutuhan khusus bisa masuk ke sekolah biasa.⁵ Istilah inklusif

⁴ E-book: Munawir Yusuf, dkk., *Pendidikan Inklusif & Perlindungan Anak*, Tiga Serangkai, Solo, 2018, hal. 10.ss

⁵ Stella Olivia, *Pendidikan Inklusi Untuk Anak-anak Berkebutuhan Khusus*, Andi, Yogyakarta, 2017, hal. 3.

mengandung arti pendeskripsian tentang penyatuan anak yang berkelainan (penyandang hambatan atau cacat) kedalam program- program sekolah.⁶

Penafsiran tentang pendidikan inklusif sesungguhnya cukup beragam sesuai dengan sudut pandang pengkaji dalam menguraikan makna substansial dari pendidikan inklusif itu sendiri. Keberagaman penafsiran secara tidak langsung telah menjadi cermin dari keterbukaan pendidikan bagi semua kalangan, baik karena perbedaan latar belakang kehidupan maupun perbedaan fisik yang tidak normal.⁷

Sekolah di Jawa Timur yang memberanikan diri menjadi sekolah inklusif baru ada 519 sekolah, yakni 472 sekolah berstatus negeri dan 47 sekolah berstatus swasta. Meski jumlah sekolah dan jenis ketunaan/kecacatan ABK yang tersebar di Jawa Timur tertampung di sekolah, namun pelaksanaan pendidikan inklusi masih belum optimal. Direktorat Manajemen Dikdasmen bekerja sama dengan *Managing Contractor Program Management-Australian Indonesia Basic Education Program* (MCPM-AIBEP) diketahui bahwa akreditasi kondisi sekolah inklusif di Provinsi Jawa Timur umumnya dinilai kategori C (jumlah skor= 24-43) dan bahkan tidak terakreditasi (jumlah skor=<24). Temuan penelitian tersebut dinyatakan bahwa kesiapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Provinsi Jawa Timur masih pada tataran E atau dapat dikatakan bahwa sekolah belum memiliki kesiapan dalam

⁶ J. David Smith Pen, Moh. Sugiarmun, MIF Baihaqi ed, *Konsep dan Penerapan Pembelajaran Sekolah Inklusif*, Nuansa, Bandung, 2012, cet.III, hal. 45.

⁷ Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2013, hal. 26.

mengimplementasikan pendidikan inklusi.⁸

Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan agama Islam tentunya memiliki kepekaan dan ramah kepada anak berkebutuhan khusus dan lebih awal penerapan pendidikan inklusif dibandingkan dengan sekolah-sekolah pada umumnya, karena merupakan ajaran yang ditekankan dalam Islam,⁹ didasarkan pada Firman Allah QS. ‘Abasa ayat 1-10 yang berbunyi :

Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan spiritualitas umat Muslim. Tujuan utamanya adalah membimbing individu untuk mengenal, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Agama Islam melibatkan berbagai aspek, mulai dari pemahaman tentang keyakinan dasar Islam, praktik ibadah, hingga etika dan moralitas.

Seorang siswa dalam pendidikan Agama Islam akan mulai belajar tentang konsep-konsep fundamental dalam Islam, seperti keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir. Mereka juga akan mempelajari kisah-kisah dari Al-Quran dan Hadis yang memberikan contoh-contoh tentang bagaimana menghadapi berbagai situasi dalam hidup dengan bimbingan dari ajaran Islam.¹⁰

⁸ Haryana, Ahmad Syaifudin, Sri Widiastuti, “Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus ABK di Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 32, No. 2 Tahun 2015, hal. 124.

⁹ Mukaffa Z, Taufik and Huda MN., “Pengembangan Model Madrasah Inklusif Studi Atas Kesiapan Dan Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Inklusif Mi Al-Hidayah, Margorejo Surabaya, Edukasi”, *UIN Sunan Ampel Surabaya Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 2017, hal. 3.

¹⁰ Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan* hal. 26.

Selain itu, pendidikan Agama Islam juga mengajarkan tentang praktik ibadah sehari-hari, seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan umrah. Siswa akan mempelajari tata cara melaksanakan ibadah ini sesuai dengan ajaran yang benar, serta pentingnya menjaga kualitas spiritual dalam melaksanakan ibadah tersebut.

Etika dan moralitas juga menjadi fokus dalam pendidikan Agama Islam. Siswa diajarkan tentang nilai-nilai kesabaran, kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan kerja keras. Mereka juga akan memahami konsep tentang memperlakukan sesama manusia dengan baik, menjaga lingkungan, serta menunjukkan rasa empati dan toleransi terhadap orang lain.

Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfokus pada aspek teori, tetapi juga mendorong siswa untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Siswa diharapkan dapat mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.¹¹

Pendidikan Agama Islam berperan dalam membentuk karakter, moralitas, dan spiritualitas individu Muslim. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, siswa diharapkan dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan menjadi contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari.¹²

¹¹ Adek Kholijah Siregar, “*Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*”, jurnal.umtapsel.ac.id, diakses 14 Mei 2023

¹² Adek Kholijah Siregar, “*Madrasah sebaga.....* 2023

Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan agama Islam tentunya memiliki kepekaan dan ramah kepada anak berkebutuhan khusus dan lebih awal penerapan pendidikan inklusif dibandingkan dengan sekolah-sekolah pada umumnya, karena merupakan ajaran yang ditekankan dalam Islam.¹³

Lingkungan madrasah, pendidikan Agama Islam menjadi inti dari proses pembelajaran. Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang secara khusus didedikasikan untuk memperdalam pemahaman agama dan nilai-nilai Islam. Pendekatan yang holistik digunakan untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya menguasai pengetahuan teoritis, tetapi juga mampu menerapkan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Pendidikan Agama Islam di madrasah tidak hanya menekankan pada pengetahuan teoritis, tetapi juga mendorong siswa untuk mempraktikkan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan nyata. Dengan pendekatan pembelajaran yang holistik, siswa madrasah diharapkan tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia, berwawasan luas, dan memiliki landasan kuat dalam agama Islam. Melalui proses ini, madrasah berperan dalam membentuk generasi yang memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat, menjadikan mereka siap menghadapi berbagai tantangan dunia modern dengan landasan spiritual yang kokoh

¹³ Mukaffa Z *et al* “*Pengembangan Model Madrasah Inklusif Studi Atas Kesiapan Dan Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Inklusif Mi Al-Hidayah, Margorejo Surabaya, Edukasi*”, UIN Sunan Ampel Surabaya *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Surabaya, 2017, hal. 3.

¹⁴ Adek Kholijah Siregar, “*Madrasah sebaga.....* 2023

MA Darul Huda Sugihwaras Bojonegoro merupakan salah satu Madrasah yang telah menerapkan sistem pendidikan Islam inklusif dan menerima beberapa siswa ABK yang ada di wilayah tersebut. Pembelajaran dalam pendidikan inklusi membutuhkan suatu cara tersendiri, bahwa suatu proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak berkebutuhan itu sendiri. Sehingga tidak mudah untuk MA Darul Huda Sugihwaras Bojonegoro dalam proses pelaksanaan pendidikan Islam inklusif. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan penelitian terkait Penerapan Nilai-nilai Pendidikan Inklusif di MA Darul Huda Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka Penulis akan mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan nilai-nilai pendidikan Islam inklusif di MA Darul Huda Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan nilai-nilai pendidikan Islam inklusif di Ma Darul Huda Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang Penulis paparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai pendidikan Islam inklusif di MA Darul Huda Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan nilai nilai pendidikan Islam inklusif di Ma Darul Huda Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi, penambah wawasan dan pemahaman dibidang pendidikan Islam khususnya yang berkaitan dengan konsep penanaman pendidikan ahlussunnah wal-jama'ah dalam pembentukan akhlak siswa di MA Darul Huda Sugihwaras Bojonegoro.

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:
 - a. Peserta didik, semoga penelitian ini dapat memberikan motivasi bagi para peserta didik agar lebih meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas secara intelektual dan spiritual;
 - b. Guru diharapkan agar selalu meningkatkan kualitas serta membangun situasi pada saat kegiatan belajar mengajar.
 - c. Bagi lembaga agar terus mengembangkan dan meningkatkan mutu Pendidikan baik secara intelektual maupun spiritual.

E. Definisi Operasional

Inklusi adalah memenuhi semua kebutuhan anak tanpa memandang perbedaan mereka dan memastikan di mana semua peserta didik mendapatkan

manfaat yang sama.¹⁵ Inklusi berarti bahwa setiap orang di komunitas manapun mensyaratkan bahwa setiap anak dipandang sebagai anak dengan kebutuhan spesifiknya sendiri dan tidak diberi label karena kemiskinan, penyakit, kecacatan atau hambatan lain untuk belajar.¹⁶

F. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian terdahulu.

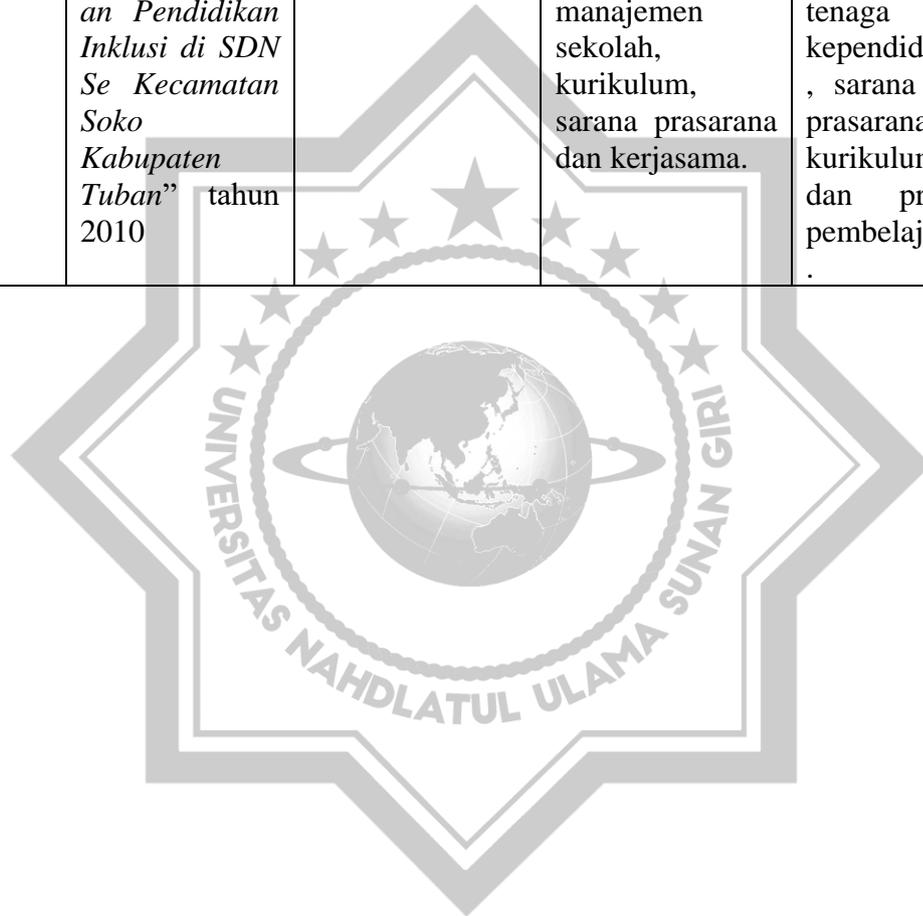
No	Nama Peneliti, Judul, Dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Susanto, “ <i>Efektivitas Program Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di SDN Giwangan</i> ”. tahun 2012.	memiliki kesamaan pada kurikulum serta sarana dan prasarana yang belum sesuai.	Keefektifan penyelenggaraan pendidikan inklusif dari aspek tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, monitoring dan evaluasi	Membahas problematika pendidikan inklusi dari tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, dan proses pembelajaran.
2	Suryani Ema Lestari, “ <i>Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di MAN Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta</i> ”. tahun 2017.	Aspek tenaga kependidikan yang kurang maksimal karena tidak adanya Guru Pembimbing Khusus.	Dalam evaluasi kebijakan pendidikan inklusif dari aspek tenaga kependidikan, aspek sarana prasarana dan pembiayaan, aspek pembinaan dan pengawasan,	Membahas problematika pendidikan inklusi dari tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, dan proses pembelajaran.

¹⁵ https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Towards_inclusive_education_Uganda.doc.

Diakses 20 Mei 2023.

¹⁶ Johan Botha, Elias Kourkoutas, *A Community of practice as an inclusive model to support Children with Social, Emotional and Behavioural Difficulties in School Contexts*, International Journal of Inclusive Education, 2015, hal. 1.

			aspek kerjasama dan peserta didik.pendidikan inklusif	.
3	Ina Agustin “Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SDN Se Kecamatan Soko Kabupaten Tuban” tahun 2010	Belum adanya kurikulum plus pada pendidikan inklusi.	Aspek tenaga kependidikan, siswa, proses pembelajaran, manajemen sekolah, kurikulum, sarana prasarana dan kerjasama.	Membahas problematika pendidikan inklusi dari tenaga kependidikan , sarana dan prasarana, kurikulum, dan proses pembelajaran .



UNUGIRI